



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMADI SUNOKO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 1018161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.355.208.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA LUBUKLINGGAU ,
HASIL SENDIRI Rp. 344.100.000
2. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 170.748.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 792.360.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 384.350.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX160 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
34.350.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 800.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 827.539.067

F. HARTA LAINNYA

Rp. 192.000.000

Sub Total

Rp. 3.559.697.067

III. HUTANG

Rp. 25.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.534.697.067

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.